

Dinamika Ruang Publik dan Demokrasi di Era New Media

Saidaturrahmah,¹ Syukur Kholil,²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹saidaturrahmah@iaialaziziyah.ac.id ²syukurkholil@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The potential of internet users, especially on social media, in Indonesia is substantial. The large number of users has resulted in a significant potential for national turmoil. Furthermore, the emergence of various elements in society that are intolerant and spread hoaxes adds to the national turmoil on social media, thereby misusing the meaning of democracy. This situation has prompted the government to take steps to address the country's divisions. At certain moments, the government takes actions to restrict the internet with the aim of maintaining national stability. These actions receive varied responses, both positive and negative. Based on these various factors, this research aims to examine the role of new media as a public space in responding to the genuine meaning of democracy. The theory employed is Jurgen Habermas's Public Sphere, where the internet should be a communicative space to create public rationality in achieving Deliberative Democracy. The research method involves a mix of literature review and quantitative descriptive methods. The SWOT analysis is used to assess the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of new media. The study's results indicate that the strength lies in the quantity and duration of internet users that can be maximized. Weaknesses include the quality and characteristics of users. There is potential in terms of infrastructure, reach, and proximity. Threats include both manifest issues such as hoaxes and incitement, as well as latent issues such as the failure to accommodate the needs of society.

Keywords: *Dynamics, Public Sphere, Democracy, New Media*

ABSTRAK

Potensi pengguna internet terutama media sosial di Indonesia sangat besar. Dengan banyaknya pengguna tersebut mengakibatkan besarnya potensi kegaduhan nasional. Apalagi, munculnya berbagai elemen masyarakat yang intoleran dan penyebar hoaks semakin menambah kegaduhan nasional di sosial media, serta menyalahgunakan makna demokrasi. Keadaan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi perpecahan negara. Seperti tindakan pada momentum tertentu pemerintah melakukan upaya pembatasan internet dengan tujuan menjaga stabilitas negara. Tindakan tersebut tentu mendapat respon beragam baik positif maupun negatif. Berdasarkan berbagai hal

tersebut penelitian ini ingin melihat, bagaimana peran new media sebagai ruang publik dalam merespon makna dari demokrasi yang hakiki. Teori yang digunakan adalah Ruang Publik dari Jurgen Habermas, dimana internet harusnya bisa menjadi ruang komunikasi guna menciptakan rasionalitas publik dalam mewujudkan Demokrasi Deliberatif. Metode penelitian ini menggunakan mix methode studi pustaka dan deskriptif kuantitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman dari new media. Hasil kajian menunjukkan kekuatan berupa jumlah dan lama pengguna internet dapat dimaksimalkan. Kelemahan berupa kualitas dan karakteristik pengguna. Potensi adanya sarana prasarana, jangkauan, kedekatan. Ancaman yang dapat dilihat ada dua yakni manifest berupa hoaks dan hasutan, serta laten berupa tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: *Dinamika, Ruang Publik, Demokrasi, New Media*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi internet (new media) telah diramalkan oleh Marshal Mc Luhan sejak 1964 (Logan et al., 1994). Luhan berpendapat bahwa teknologi komunikasi akan sampai pada kemunculan, telepon tanpa kabel, teater tanpa gedung, dan bioskop tanpa lampu sorot (Morissan & Hamid, 2010). Media sosial juga merupakan salah satu ruang yang muncul akibat perkembangan media baru.

Pengguna sosial media di Indonesia sangat besar jika dilihat dari data yang ada. Dari salah satu platform yakni Twitter saja Indonesia tercatat memiliki 77 juta pengguna aktif, dari total 388 juta dari seluruh dunia. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 3 besar pengguna Twitter dari seluruh dunia pada tahun 2016. Hal tersebut ditambah dengan jumlah 4 milyar postingan / cuitan pada 4 tahun terakhir (Manan, 2018).

Potensi tersebut juga diiringi dengan banyaknya oknum yang melakukan mobilisasi massa dengan menyebarkan hoaks. Seperti yang terjadi dalam kasus kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Puncak sebaran hoaks dan hasutan dalam kerusuhan Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah URL situs web penyebar hoaks mencapai 72.500. Penyebaran hoaks terus menurun, 42 ribu URL pada 31 Agustus 2019, 19 ribu URL pada 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 URL hoaks dan hasutan pada 6 September 2019 (Juniarto, 2019).

Kasus tersebut sampai mendapat perhatian internasional terutama terkait pembatasan akses internet dalam wilayah indonesia bagian timur. Banyak pro dan kontra terkait upaya pemerintah dalam menjaga keharmonisan bernegara tersebut (Juniarto, 2019). Akan tetapi terbukti dengan pembatasan internet baik berupa pemblokiran menyeluruh, pemutusan jaringan (*Internet shutdown*), maupun pembatasan akses yang dilakukan pemerintah telah berhasil menekan hoaks dalam menjaga stabilitas negara.

Pemikiran Jurgen Habermas bahwa masyarakat modern dalam sebuah Ruang Publik harus sampai pada titik Demokrasi Deliberatif. Asumsi tersebut berbicara bahwa pengambilan keputusan, bukan hanya pada pendapat umum atau perseorangan, tapi pada proses yang terbuka dan argumentatif, Singkatnya; Rasionalitas Komunikasi (Hardiman, 1993). Di era saat ini ancaman perpecahan sangat sulit dihindari, terbukti pemerintah sampai melakukan upaya di atas dalam menjaga stabilitas negara.

Hoaks dan ancaman sejenis lain adalah musuh bersama dalam kehidupan di Indonesia dengan ideologi Pancasila yang memiliki semangat demokrasi di era New Media ini. Dalam kasus tersebut demokrasi deliberatif di era saat ini sulit tercapai akibat publik tidak memahami bahwasanya kebebasan berpendapat selalu dibatasi oleh kebebasan orang lain (Shelton, 2006). Sehingga disitulah rasionalitas komunikasi terbentuk seperti yang tercermin dalam sila keempat permusyawaratan rakyat.

Internet dan sosial media adalah ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memunculkan rasionalitas komunikasi publik. Namun juga perlu digaris bawahi bahwa publik menemui ancaman hoaks yang dapat membahayakan demokrasi yang menjadi simbol dari negara Indonesia. Dari paparan di atas penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran new media sebagai ruang publik dalam merespon ancaman demokrasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada pegiat media aktif, dengan sumber data primernya diperoleh dengan wawancara, observasi lapangan serta dokumentasi mengenai dinamika penggunaan media massa dan nilai demokrasi. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal ilmiah dan artikel yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang menggunakan tiga komponen pokok dalam analisis data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 112).

HASIL DAN PEMBAHASAN

New Media sebagai ruang publik baru dalam menjaga demokrasi memiliki potensi besar. Meminjam pendapat Habermas tentang ruang publik adalah ruang yang mampu mengakomodasi kepentingan publik maka internet adalah salah satu ruang paling representatif dalam mengemukakan pendapat. Selain jumlah pengguna yang besar, 50% pengguna internet rata-rata menggunakan internet lebih dari 5 jam sehari. Berarti 25% kehidupan masyarakat saat ini digunakan untuk mengakses internet.

Selain itu dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen yang sudah terhubung ke internet (Pratomo, 2019). Jika di komparasi dengan asumsi data di atas maka lebih dari 80 juta orang di Indonesia menggunakan internet lebih dari 5 jam. Tentu ini adalah potensi besar dalam melakukan mobilisasi massa dalam upaya menjaga demokrasi, karena untuk mendapatkan massa sebanyak dengan durasi selama itu bukanlah perkara mudah. Melalui new media bisa menjadi ruang untuk mengakomodir masyarakat dalam upaya menjaga demokrasi.

Namun setiap kekuatan selalu di ikuti dengan kelemahannya. Dalam konteks new media sebagai ruang virtual pada upaya menjaga demokrasi kelemahan utamanya justru pada anonimnya karakteristik masyarakat virtual. Masyarakat terbiasa untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai topik apa yang sedang dibicarakan hari ini atau bahkan pada detik ini juga untuk diketahui. Kebutuhan tersebut membawa masyarakat berselancar di dunia maya dalam kapanpun dan dimanapun. Internet dan sosial media menjadi salah satu penyedia informasi yang paling dekat dan paling sering masyarakat akses (Carr, 2010). Terkait virus corona ini misalnya, masyarakat bisa mendapatkan beragam gambar dan video. Padahal, anonimitas dalam ruang virtual memungkinkan semua orang tanpa terkecuali dapat menyebarkan berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu publik belum sadar dalam penggunaan ruang publik selalu ada aksioma Habermas. Bahwa kebebasan kita selalu dibatasi oleh kebebasan publik. Kesadaran publik belum maksimal menjadikannya rawan untuk dijadikan sarana adu domba. Internet telah mendangkalkan cara bekerja otak, menurut Nicolas Carr dalam bukunya yang berjudul *The Shallow publik internet* cenderung tergantung dengan mesin (Carr, 2010). Mereka biasa membaca cepat tanpa konfirmasi dan mengambil kesimpulan dari permukaan. Itu mengakibatkan sangat mudah terjadinya hasutan yang ada di internet secara umum.

Dari sisi keberadaan pengguna, internet telah mentransformasikan perannya secara beragam. Bagi Habermas (2006) sendiri, keberadaan internet telah memperluas sekaligus mengfragmentasikan konteks komunikasi. Terbukti kasus hasutan dan hoaks seperti yang dipaparkan dalam bab pendahuluan di atas menunjukkan bahwa masih banyak oknum yang cenderung suka seenaknya dan bebas dalam menggunakan ruang publik secara tidak bertanggung jawab.

Potensi internet sebagai ruang yang murah dan dekat dengan masyarakat menjadikannya sumberdaya yang dapat memperkuat demokrasi. Menurut data di atas dengan lama dan banyaknya pengguna, menunjukkan New Media adalah ruang informasi yang paling dekat dengan masyarakat. Karakteristiknya yang mudah diakses, ditambah dukungan pemerintah melalui program pembangunan Palapa Ring dengan membangun jaringan *fiber optic* sejauh 22.000 Km untuk

seluruh wilayah di Indonesia menjadikan akses internet bukan lagi persoalan yang susah (Gewati, 2019).

Maka potensi ini bisa dimaksimalkan dalam upaya menjaga demokrasi. Kedekatan (*Aproximity*) adalah konsep utama dalam studi khalayak. Wacana persatuan, demokrasi dan penegakkan ideologi Pancasila tentu menjadi langkah awal yang harus dibicarakan publik dalam ruang ini. Pihak terkait bisa membuat konten, atau wadah yang menjadi representasi dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian publik menjadi semakin dekat dengan agenda menjaga demokrasi karena dalam jarak yang sama atau medium yang sama.

Ancaman internet sebagai ruang publik dalam konteks demokrasi bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Namun dalam kajian kali ini hanya akan dibahas dari aspek keinginan publik dan agenda negara. Pembahasan itu berdasar pada pemikiran Habermas bahwa ruang publik harusnya merupakan tempat untuk mengkomdir keduanya.

Dalam menyikapi *hoaks* yang merupakan ancaman berupa hasutan dan ujaran untuk memecah belah bangsa. Pemerintah memiliki agenda menjaga stabilitas negara, salah satunya adalah upaya Pembatasan Internet (pemblokiran internet/mengisolasi jaringan internet secara menyeluruh dan sebagian/internet shutdown). Hasilnya berkurang dengan sedikitnya URL yang membawa pesan hoaks atau hasutan.

Namun keinginan masyarakat justru sebaliknya, beberapa tagar dalam sosial media Twitter dan Instagram bernada menolak dan menghujat. Masyarakat yang terbiasa mengakses informasi dengan mudah merasa terbatas. Hal tersebut diperparah dengan beberapa aksi yang menolak hal tersebut.

Dalam survei yang dilakukan kajian ini menunjukkan bahwa, 16% Responden sangat tidak setuju, 40% Responden Tidak setuju, sisanya 24% ragu-ragu, 20 % setuju dengan upaya penemrintah melakukan upaya pembatasan internet. Data tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat sebenarnya rata-rata kurang setuju dengan upaya tersebut.

Dalam kasus pembatasan internet Responden juga diminta untuk menjawab pertanyaan dalam dua peristiwa yang berbeda. Hasilnya dalam peristiwa pembatasan internet sidang putusan Mahkamah Konstitusi mayoritas Responden cenderung berpikir positif bahkan, 36 % menjawab setuju. Namun berbeda dalam kasus terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat Mayoritas Responden 44% menjawab sangat tidak setuju.

Hal tersebut mengindikasikan secara global bahwa meskipun pembatasan akses internet adalah upaya yang dinilai efektif namun bertentangan dengan keinginan publik. Maka diperlukan sebuah upaya rekonsiliasi publik dalam menyikapi problematika ini. Dalam sebuah kasus di India, pemadaman informasi memaksa demonstran dalam aksi kolektif untuk mengganti taktik tanpa kekerasan

dengan taktik kekerasan. Artinya, justru dengan ketiadaan informasi, intensitas kekerasan meningkat (Juniarto, 2019). Tentu hal ini justru menjadi ancaman yang latent bagi kebihnekaan. Mengingat konsep pemikiran Elisabeth Nolan neuman mengenai Spiral keheningan, bahwa opini publik yang tidak nampak di permukaan suatu saat akan melontar dan menimbulkan kekacauan opini jika tidak diakomodasi oleh opini dominan.

PENUTUP

Kekuatan new media dalam konteks menjaga demokrasi begitu besar dengan jumlah pengguna dan lama pengguna menjadikan kekuatan dalam malakukan mobilisasi massa. Akan tetapi karakteristik masyarakat yang tidak terbiasa selektif akan informasi ditambah dengan new media menjadikan masyarakat menjadi lebih instan dalam segala hal membuat kualitas pengguna tak sebanding dengan kuantitas. Potensi berupa kedekatan dan sarana yang disiapkan pemerintah adalah hal yang dapat mendukung peran new media menjaga demokrasi. Di samping itu terdapat ancaman yang perlu dihindari dalam menjadikan new media sebagai ruang publik. Hal tersebut dibagi menjadi dua yakni ancaman Manifest berupa hoaks dan hasutan, serta ancaman laten berupa tidak terakomodasinya kebutuhan masyarakat dalam penanganan kegaduhan Nasional.

Kajian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyarankan untuk melakukan kajian mendalam dan meluas dengan jumlah informan dan data yang lebih komprehensif serta representatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru dibidang kajian komunikasi terutama komunikasi digital dan pengembangan pemikiran Jurgen Habermas terkait Ruang Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Carr, N. (2010). *The Shallows What the Internet Is Doing to Our Brains*. W. W. Norton & Company.
- Gewati, M. (2019). *Mengenal Lebih Jauh "Tol Langit."* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/04/10350001/mengenal-lebihjauh-tol-langit>
- Hardiman, F. B. (1993). *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat & Politik Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2004). *Demokrasi deliberatif: model untuk Indonesia pasca-Soeharto*. Majalah Basis Nomor, 11-12.
- Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). *Exploring SWOT analysis—where are we now?* Journal of Strategy and Management.
- Juniarto, D. (2019). *Internet Shutdown di Indonesia: Ironi di Zaman Reformasi dan Revolusi 4.0*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/10/100810565/internetshut-down-di-indonesia-ironi-dizaman-reformasi-dan-revolusi-40>
- Kadarsih, R. (2008). *Demokrasi dalam Ruang Publik: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia*. Jurnal Dakwah, 9(1), 1-12.
- Morissan, A. C. W., & Hamid, F. (2010). *Teori Komunikasi Massa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Morissan,(2013). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nasrullah, R. (2015). *Internet dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi atas Teori Ruang Publik Habermas*. Komunikator, 4(01). <http://journal.umy.ac.id/index.php/jkm/article/view/188>
- Neuman, W. L. (2013). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks.
- Pratomo, Y. (2019). *APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*. Kompas.Com.<https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apji-i-jumlahpengguna-internet-di-indonesiatembus-171-juta-jiwa>
- Qorib, F. (2020). *Persepsi Hoax Politik Caleg Perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kota Malang*. WARTA Iski, 3(01), 13-22.
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). *Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah*. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 12(1), 105-118. <https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.446>
- Shelton, A. G. (2006). *Public Sphere and Communicative Rationality: Interrogating Habermas's Eurocentrism*. Journalism and Communication Monographs, 8(2), 93-156. <https://doi.org/10.1177/152263790600800201>

- Supraja, M. (2018). *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*. UGM PRESS.
- Wilkins, K. G. (2000). *Redeveloping communication for social change: Theory, practice, and power*. Rowman & Littlefield.